

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi di antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Ketika suatu perusahaan kecil beroperasi, hubungan keagenan belum begitu dibutuhkan karena pemilik perusahaan tersebut dapat saja menjadi seorang manajer dari perusahaan yang dimilikinya. Namun semakin berkembangnya suatu perusahaan, pemilik tersebut tidak mungkin mengelola perusahaannya seorang diri. Oleh karena itu pemilik tersebut menunjuk pihak lain sebagai manajer untuk membantu dalam mengelola perusahaannya dan memperoleh keuntungan.

Pemilik dan pemegang saham merupakan pihak-pihak yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan dapat sesuai dengan kepentingan pemilik. Berdasarkan kondisi tersebut timbulah hubungan keagenan di antara pemilik, pemegang saham dan manajer. Hubungan antar agen terjadi pada saat satu orang atau lebih disebut *principal* mengangkat satu atau lebih orang lain disebut *agent* untuk bertindak atas nama pemberi wewenang dan memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Sartono, 2010).

Adapun pengertian hubungan keagenan menurut Michael Jensen dan William Meckling dalam Brigham yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait (2005:20), adalah sebagai berikut:

“Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, di mana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut.”

Hubungan keagenan ini tidak hanya terjadi pada pemilik dan manajer saja tetapi hubungan keagenan juga terjadi pada pemilik, pemegang saham dan kreditor. Seperti yang disampaikan oleh Michael Jensen dan William Meckling dalam Brigham yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait (2005:20), adalah sebagai berikut: “dalam kerangka kerja manajemen keuangan, hubungan keagenan terdapat (1) di antara pemegang saham dan manajer dan (2) di antara pemegang saham dan kreditor (pemberi pinjaman).”

Hubungan keagenan ini juga seringkali menimbulkan konflik atau masalah yang terjadi di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan antar agen sering disebut dengan *agency problem* (Sartono, 2010). Konflik keagenan atau masalah keagenan ini terjadi disebabkan oleh kepentingan yang saling bertentangan yaitu berusaha mencapai kebutuhan masing-masing pihak.

Masalah keagenan ini sangat potensial terjadi dalam perusahaan ketika manajer memiliki proporsi kepemilikan yang relatif kecil yaitu kurang dari seratus persen saham perusahaan. Oleh karena itu, tidak jarang manajer yang seharusnya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dan pemilik melakukan ekspansi, yang tujuannya adalah mempertahankan posisinya sebagai manajer perusahaan.

Untuk menghindari masalah keagenan antara pemilik dan manajer, terdapat beberapa mekanisme yang dapat memotivasi manajer agar bertindak yang terbaik sesuai dengan kepentingan pemegang saham misalnya pemberian kompensasi yang cukup baik, intervensi langsung oleh pemegang saham, ancaman untuk dipecat atau *threat of firing* dan ancaman untuk diambil alih atau *threat of takeover* (Sartono,2010).

Selain itu untuk menghindari masalah keagenan antara pemilik dan manajer dapat pula dengan melakukan pengaplikasian prinsip konservatisme. Pengaplikasian prinsip konservatisme ini dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan manajer. Menurut Lafonds dan Watts (2006) dalam Ardina (2012), bahwa penerapan konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan.

Agency problem tidak hanya terjadi pada pemilik, pemegang saham dan manajer saja tetapi juga dengan kreditor. Seperti yang disampaikan oleh Sudana (2011:11), sebagai berikut:

“Masalah keagenan tidak hanya timbul antara pemilik dan manajemen, tetapi juga bisa timbul antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, atau antara pemegang saham dan pihak kreditor ketika perusahaan dilikuidasi.”

Perbedaan kepentingan yang terjadi pada pihak-pihak yang memiliki hubungan keagenan ini sulit sekali dihindari. Tidak jarang masalah keagenan ini juga terjadi pada pemilik, pemegang saham dan kreditor. Masalah keagenan yang terjadi kepada pemegang saham dan kreditor biasanya diakibatkan oleh masalah pembayaran dividen. Pembayaran dividen kas dalam jumlah besar akan

menyebabkan berkurangnya aktiva yang tersedia untuk melunasi utang perusahaan kepada kreditor.

Selain itu kreditor juga seringkali merasa dieksploitasi oleh pemegang saham. Pandangan ini terjadi ketika perusahaan melakukan ekspansi perusahaan yang mengakibatkan risiko yang besar bagi perusahaan dan kreditor. Jika ekspansi itu berhasil, maka pihak yang paling banyak menikmati keberhasilan tersebut adalah pemegang saham, tetapi apabila ekspansi tersebut mengalami kegagalan atau perusahaan mengalami kebangkrutan maka kreditor juga harus turut menanggung kerugian tersebut.

Untuk mengurangi masalah keagenan dan menjamin manajer akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan pemilik dan pemegang saham secara maksimal maka timbulah biaya keagenan atau *agency cost*. Ada pun pengertian dari biaya keagenan menurut Brigham yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:21), adalah sebagai berikut: “biaya keagenan adalah biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak di antara manajer, pemegang saham dan kreditor.”

Biaya keagenan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperkecil masalah keagenan mencakup beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Sartono (2010:12), adalah sebagai berikut:

“Dalam usaha meminimumkan *agency problem*, maka biaya yang disebut *agency cost* yang mencakup:

1. Pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi pemegang saham.

2. Pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi yang konsisten yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Bentuk insentif yang umum adalah *stock option*, yaitu pemberian hak kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Bentuk kedua adalah *performance shares*, yaitu pemberian saham kepada manajemen atas pencapaian tujuan, yaitu pencapaian tingkat return tertentu. Pemberian insentif sering pula berupa pemberian *cash bonus* atau bonus kas yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu.
3. *Fidelity bond* adalah kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga yaitu *bonding company* setuju untuk membayar perusahaan jika manajer berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. *Fidelity bonding* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur.
4. *Golden parachutes* dan *Poison pill* dapat digunakan pula untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. *Golden parachutes* adalah suatu kontrak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi sejumlah tertentu apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Dengan demikian manajemen tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan *poison pill* adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil-alih oleh perusahaan lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan saham pada harga tertentu atau mengeluarkan obligasi disertai dengan hak penjualan obligasi pada harga tertentu. Sehingga apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, pembeli perusahaan wajib membeli saham dan obligasi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.”

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal atau *signaling theory*, merupakan teori yang menjelaskan mengenai pemberian sinyal yang dilakukan oleh manajer kepada pihak eksternal mengenai prospek perusahaan. Sinyal yang diberikan manajer kepada pihak eksternal ini dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi yang muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Umumnya, manajer tidak

memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pasar saham dan tingkat bunga di masa yang akan datang, tetapi mereka lebih mengetahui kondisi dan prospek perusahaan.

Adapun pengertian asimetri informasi menurut Modigliani-Miller (MM) dalam Brigham yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:185), yaitu: “informasi asimetris (*asymmetric information*) adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda (lebih baik) tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh investor.”

Menurut Rahmawati (2012:3), asimetri informasi terbagi menjadi dua tipe, di antaranya adalah:

“Ada dua tipe asimetri informasi:

1. ***Adverse selection*** adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial, memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti para manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya, lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.
2. ***Moral hazard*** adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial, dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik dari kebanyakan perusahaan.”

Asimetri informasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ketika manajer sebagai pengelola perusahaan, memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak luar, maka ia sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Manipulasi yang paling sering dilakukan adalah mengakui laba

secara optimis. Hal ini dapat saja terjadi, karena laba perusahaan merupakan cerminan dari kinerja perusahaan.

Adanya kesempatan untuk memilih beberapa metode akuntansi membuka peluang bagi manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan adalah dengan memilih akuntansi konservatif (Haniati dan Fitriany, 2010). Akuntansi konservatif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu dengan cara memberikan batasan kepada manajemen dalam menggunakan informasi yang mereka miliki.

2.1.3 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif atau (*Positive Accounting Theory*) menjelaskan mengenai fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang akan terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu.

Adapun pengertian dari teori akuntansi positif menurut Rahmawati (2012:86), adalah: “teori akuntansi positif adalah berhubungan dengan prediksi, yaitu suatu tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru.”

Prediksi dan penjelasan dalam teori akuntansi positif ini didasarkan pada hubungan keagenan yang terjadi antara manajer dengan pihak lain seperti

investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. Kebebasan yang dimiliki manajer dalam memilih metode akuntansi dan menentukan kebijakan akan menimbulkan perilaku oportunistik. Manajer dapat saja memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan tujuannya.

Teori akuntansi positif menganggap bahwa manajer secara rasional akan memilih metode akuntansi yang baik menurut mereka. Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif menurut Ghazali dan Chariri (2007:70), di antaranya:

“Teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis, yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direksi tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

2. Hipotesis Hutang/Ekuitas (*Debt/equity Hypothesis*)

Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga ia dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

3. Hipotesis Cost Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahal nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Selain itu, kontrak yang dilakukan oleh individu sangatlah mahal di dalam suatu proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum dan regulasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.”

2.1.4 Kebijakan Dividen

2.1.4.1 Pengertian Dividen

Pemilik suatu perusahaan bersedia menanamkan hartanya dalam suatu perusahaan karena berbagai alasan, salah satunya adalah untuk memperoleh penghasilan atas investasi yang ia lakukan dalam perusahaan tersebut. Penghasilan ini dapat diperoleh dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan dimana pemegang saham itu melakukan investasi. Dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya sesuai dengan saham yang ia miliki.

Adapun pengertian dividen menurut Rudianto (2012:290), adalah sebagai berikut: “dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan.”

Pengertian dividen yang disampaikan oleh Rudianto mengandung makna yang hampir sama dengan pengertian dividen yang disampaikan oleh Hanafi (2010:361), yaitu sebagai berikut: “dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham disamping *capital gain*.”

Sedangkan pengertian dividen menurut Harrison, dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2011:23) adalah sebagai berikut: “dividen (*dividend*) adalah distribusi oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya, yang biasanya didasarkan pada laba.”

Lalu ada pula pengertian dividen menurut Jusuf (2001:332), adalah sebagai berikut: “dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham.”

Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan suatu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan yang biasanya berasal dari laba perusahaan.

Pembagian dividen ini ditetapkan oleh dewan komisaris perusahaan sesuai dengan jumlah saham dan jenis saham yang dimiliki. Dalam menentukannya, dewan komisaris harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu tidak jarang dewan komisaris memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari labanya untuk keperluan di masa yang akan datang.

2.1.4.2 Jenis-jenis Dividen

Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan jenis saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham, serta jenis pembayarannya tergantung kepada kebijakan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan.

Adapun jenis-jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya menurut Rudianto (2012:290), adalah sebagai berikut:

“Jenis-jenis dividen yang dapat disampaikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya adalah:

1. Dividen Tunai

Dividen Tunai, yaitu bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sebelum dividen dibagikan, perusahaan mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Jika perusahaan memilih untuk membagi dividen tunai, itu berarti pada saat dividen akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup. Dividen tunai tidak dibagikan kepada pemegang saham treasury.

2. **Dividen Harta**

Dividen Harta, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Biasanya harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki perusahaan. Jika surat berharga yang dimiliki suatu perusahaan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya, maka nilai wajar atau harga pasar surat berharga tersebut dijadikan dasar pencatatan.

3. **Dividen Skrip atau Dividen Utang**

Dividen Skrip atau dividen utang, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Dividen skrip terjadi karena perusahaan ingin membagi dividen dalam bentuk uang tunai, tetapi tidak tersedia kas yang cukup, walaupun laba ditahan menunjukkan saldo yang cukup. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan menjanjikan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang kepada para pemegang saham. Dividen skrip dapat disertai dengan bunga dan dapat pula tanpa bunga.

4. **Dividen Saham**

Dividen Saham, yaitu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Dividen saham ini dibagikan karena perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian laba usaha yang diperolehnya secara permanen. Pembagian dividen saham akan mengakibatkan jumlah saham yang beredar bertambah banyak, tetapi total aset dan kewajiban perusahaan tidak akan mengalami perubahan baik sebelum atau sesudah pembagian dividen.”

2.1.4.3 Pengertian Kebijakan Dividen

Adapun pengertian kebijakan dividen menurut Harjito dan Martono (2011:270), yaitu sebagai berikut:

“Kebijakan dividen (*dividend policy*) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.”

Ada pula pengertian kebijakan menurut Sartono (2010:281), yaitu sebagai berikut:

“Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang.”

Kemudian pengertian kebijakan dividen menurut Sudana (2011:167), adalah sebagai berikut:

“Keputusan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Laba di tahan merupakan salah satu sumber dana internal perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian dari kebijakan dividen di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditanam kembali di dalam perusahaan untuk menambah modal investasi di masa yang akan datang.

2.1.4.4 Teori-teori Kebijakan Dividen

Menurut Sartono (2010:282-290), teori kebijakan diividen terdiri dari beberapa teori, di antaranya:

“Teori kebijakan dividen terdiri dari:

1. Dividen Adalah Tidak Relevan

Modigliani-Miller (MM) berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang *given*, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut MM berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh *earning power* dari asset perusahaan. Dengan demikian nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara itu keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

2. *Bird In The Hand Theory*

Salah satu asumsi pendekatan Modigilan-Miller (MM) adalah bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada

menunggu *capital gain*. Gordon-Lintner beranggapan bahwa investor memnadang satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Sementara itu MM berpendapat bahwa tidak semua investor berkeinginan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama atau sejenis dengan memiliki risiko yang sama, oleh sebab itu tingkat risiko pendapatan mereka di masa yang akan datang bukannya ditentukan oleh kebijakan dividen, tetapi di tentukan oleh tingkat risiko investasi baru.

3. *Tax Differential Theory*

Pendapatan yang relevan bagi kebanyakan investor adalah pendapatan setelah pajak. Jika *capital gain* dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya jika *capital gain* dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan *capital gain* menjadi berkurang. Namun demikian, pajak atas *capital gain* masih lebih baik dibandingkan dengan pajak atas dividen, karena pajak atas *capital gain* baru dibayar setelah saham dijual sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. Selain itu juga mempengaruhi pendapatan investor. Investor lebih suka untuk menerima *capital gain* yang tinggi dibanding dengan dividen yang tinggi. Karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada *capital gain*, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan *dividend yield* yang tinggi.

4. *Information Content Hypothesis*

Modigliani-Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen adalah tidak relevan dengan mengasumsikan baik investor maupun manajer memiliki informasi yang sama atas berbagai kesempatan investasi, sehingga investor dan manajer memiliki penilaian yang sama terhadap perusahaan dan kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya, manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibanding dengan investor atau pemegang saham, akibatnya investor menilai bahwa *capital gain* lebih berisiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas.

Pembayaran dividen seringkali diikuti dengan kenaikan harga saham dan sebaliknya. Modigliani-Miller (MM) selanjutnya berpendapat bahwa kenaikan dividen ini oleh investor dilihat sebagai tanda atau signal bahwa prospek perusahaan di masa yang akan datang lebih baik dan sebaliknya jika terjadi penurunan dividen maka prospek perusahaan menurun.

5. *Clientile Effect*

Terdapat banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan. Ada investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen dan ada pula investor yang lebih menyukai

untuk menginvestasikan kembali pendapatan mereka. Dengan adanya dua kelompok investor tersebut, perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang dianggap manajemen lebih baik. Ada kecenderungan perusahaan enggan melakukan perubahan kebijakan dividen karena perubahan kebijakan dividen mengakibatkan beberapa investor akan menjual sahamnya dan akibatnya dapat menurunkan harga saham.

Tidak jarang pula ada perusahaan yang membagikan dividen diikuti dengan penjualan obligasi. Ada dua hal penting dalam kebijakan ini, pertama pembagian dividen tersebut digunakan untuk memberi sinyal ke pasar tentang prospek perusahaan dengan harapan perusahaan dapat menjual obligasinya dengan harga yang lebih baik. Kedua, pembagian dividen itu dimaksudkan untuk mengurangi *agency conflict* antara manajer dengan pemegang saham.”

Ada pula teori kebijakan dividen menurut Sudana (2011:167), yang menyatakan terdapat tiga teori kebijakan dividen yang menjelaskan pengaruh besar kecilnya *dividend payout ratio* (DPR) terhadap harga pasar saham. Adapun ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut :

“Tiga teori kebijakan dividen:

1. Teori *Dividend Irrelevance*

Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller (Modigliani-Miller/MM). Menurut teori *dividend irrelevance*, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (*earning power*) dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

2. Teori *Bird In the Hand*

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Berdasarkan teori *bird in the hand*, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor.

3. Teori *Tax Preference*

Berdasarkan teori *tax preference*, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan, maka semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang

bersangkutan. Hal ini dapat terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak lebih tinggi daripada pajak capital gain, maka investor akan lebih senang jika laba yang diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan, untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian di masa yang akan datang diharapkan terjadi pengingkatan capital gain yang tarif pajaknya lebih rendah. Apabila banyak investor yang memiliki pandangan demikian, maka investor cenderung memilih saham-saham dengan dividen yang kecil dengan tujuan menghindari pajak.”

2.1.4.5 Jenis-jenis Kebijakan Dividen

Menurut Riyanto (2008:269), terdapat macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

“Adapun macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. **Kebijakan Dividen yang Stabil.**

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut nampak mantap dan relatif permanen, barulah besarnya dividen per lembar saham dinaikkan. Dan dividen yang dinaikkan ini akan dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang.

2. **Kebijakan Dividen dengan Penetapan Jumlah Dividen Minimal Plus Jumlah Ekstra Tertentu.**

Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut.

3. **Kebijakan Dividen dengan Penetapan *Dividen Payout Ratio* yang Konstan.**

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan *dividend payout ratio* yang konstan misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya.

4. **Kebijakan Dividen yang Fleksibel.**

Cara penetapan *dividen payout ratio* yang keempat adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahunnya

disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan.”

2.1.4.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, di antaranya adalah kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa yang akan datang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan menurut Riyanto (2008:267), yaitu:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan dapatlah disebutkan antara lain sebagai berikut:

- 1. Posisi Likuiditas Perusahaan**

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan “*cash outflow*”, maka makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar kemampuannya untuk membayar dividen.

- 2. Kebutuhan Dana untuk Membayar Utang**

Apabila suatu perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus terebut. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba yang ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, yang ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau *earning* yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Dengan kata lain perusahaan harus menetapkan *dividend payout ratio* yang rendah.

- 3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan**

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut biasanya lebih senang untuk menahan “*earning*”nya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan makin besar dana yang

dibutuhkan, makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, yang ini berarti makin rendah “*dividend payout ratio*”nya.

4. Pengawasan terhadap Perusahaan

Variabel penting lainnya adalah “*control*” atau pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari penjualan saham baru akan melemahkan “*control*” dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan utang akan memperbesar risiko finansialnya. Mempercayakan pada pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan “*control*” terhadap perusahaan, berarti mengurangi “*dividend payout ratio*”nya.’

Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut

Sartono (2010:293), adalah sebagai berikut:

“Berikut faktor-faktor yang sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan dividen:

1. Kebutuhan Dana Perusahaan

Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis kebijakan dividen, seperti aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa yang akan datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan persediaan, pola pengurangan utang dan masih banyak lagi.

2. Likuiditas

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena bagi perusahaan dividen merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan *profitable* akan memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai investasinya, oleh karena itu memungkinkan untuk menjadi kurang likuid karena dana yang diperoleh lebih banyak diinvestasikan pada aktiva tetap dan aktiva lancar yang permanen.

3. Kemampuan Meminjam

Likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu fleksibilitas juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar dan sudah

establish akan memiliki akses yang baik di pasar modal. Kemampuan meminjam yang lebih besar dan fleksibilitas yang lebih besar akan memperbesar kemampuan dalam membayar dividen.

4. Keadaan Pemegang Saham

Jika kepemilikan saham suatu perusahaan relatif tertutup, biasanya manajemen mengetahui dividen yang diharapkan oleh para pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan *high tax* dan lebih suka memperoleh *capital gains*, maka perusahaan dapat mempertahankan *dividend payout ratio* yang rendah. Untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam konteks pasar.

5. Stabilitas Dividen

Bagi para investor, stabilitas dividen akan lebih menarik daripada *dividend payout ratio* yang tinggi. Stabilitas ini diartikan dengan tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan dengan koefisien arah yang positif. bagi investor, pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula. Dengan demikian risiko perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen secara tidak stabil.”

2.1.4.7 Dividend Payout Ratio

Rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*) atau rasio antara dividen yang dibayar dibandingkan dengan laba yang diperoleh, menentukan jumlah laba yang dapat ditahan (*retained earnings*).

Adapun pengertian *dividend payout ratio* menurut Sudana (2011:167), adalah: “*dividend payout ratio*, yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.”

Penentuan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, memerlukan kebijakan dividen tersendiri. Kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pendanaan perusahaan, yang menentukan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk keperluan investasi di masa yang akan datang.

Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern. Semakin besar laba yang ditahan berarti, maka semakin kecil dana yang tersedia untuk pembayaran dividen, dan sebaliknya semakin kecil laba yang ditahan, maka semakin besar laba yang dibagi untuk pembayaran dividen.

Adapun rumus *dividend payout ratio* atau pembayaran dividen menurut Fahmi (2014:139), adalah:

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

Keterangan:

Dividend Per Share = Dividen per lembar saham

Earning Per Share = Pendapatan per lembar saham

2.1.4.7.1 Pengertian *Dividend Per Share*

Adapun pengertian *dividen per share* (DPS) menurut Irawati (2006:64), adalah: “dividen per lembar saham (DPS) adalah besarnya pembagian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham setelah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.”

Besarnya dividen per lembar saham (DPS) menurut Irawati (2006:64), dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DPS = \frac{\text{Total dividen yang dibagikan}}{\text{Jumlah lembar saham yang beredar}}$$

2.1.4.7.2 Pengertian *Earning Per Share*

Adapun pengertian *earning per share* (EPS) menurut Fahmi (2014:138), adalah sebagai berikut: “*earning per share* atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung *earning per share* menurut Fahmi (2010:138), adalah:

$$EPS = \frac{\text{Earning After Tax}}{Jsb}$$

Keterangan:

Earning after tax = Pendapatan setelah pajak
Jsb = Jumlah saham yang beredar.

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Pengertian *Leverage*

Keputusan pembelanjaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Pada kondisi perekonomian yang baik, perusahaan dengan porsi penggunaan utangnya yang lebih besar daripada modal sendiri mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang penggunaan utangnya lebih kecil dari modal sendiri. Sedangkan ketika kondisi perekonomian buruk, perusahaan dengan tingkat penggunaan utang yang lebih besar dari modal sendiri akan menghasilkan laba yang lebih kecil

dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat penggunaan utangnya yang lebih kecil dari modal sendiri.

Leverage timbul ketika perusahaan dalam kegiatan operasionalnya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu aktiva tetap yang menimbulkan biaya penyusutan dan utang yang menimbulkan biaya bunga. Adapun pengertian *leverage* menurut Harjito dan Martono (2011:315), adalah sebagai berikut:

“*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana (*sources of fund*) oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.”

Sedangkan pengertian *leverage* menurut Sulistiyowati, dkk (2010) adalah sebagai berikut: “*leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.”

Berdasarkan pengertian *leverage* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dan sumber dananya yang mana aset dan sumber dana tersebut memiliki biaya tetap atau beban tetap.

2.1.5.2 Jenis-jenis *Leverage*

Leverage yang timbul akibat keputusan investasi yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap disebut *operating leverage*, sedangkan *leverage* yang timbul akibat keputusan pendanaan dengan menggunakan utang disebut dengan *financial leverage*.

Adapun jenis-jenis *leverage* menurut Harjito dan Martono (2011:315), di antaranya:

“Dalam suatu perusahaan dikenal dua *macam leverage*, yaitu:

1. ***Leverage Operasi (Operating Leverage)***

Leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Biaya tetap tersebut misalnya biaya penyusutan gedung dan peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. *Leverage* operasi juga memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak (*earning before interest and tax* atau EBIT) yang diperoleh. Pengaruh tersebut dapat dicari dengan menghitung besarnya tingkat *leverage* operasi (*degree of operating leverage*).

2. ***Leverage Keuangan (Financial Leverage)***

Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham atau *earning per share* (EPS). Masalah *leverage* keuangan baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan *leverage* yang menguntungkan atau efek positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Efek yang menguntungkan dari *leverage* keuangan sering disebut “*trading in equity*”. *Leverage* keuangan akan merugikan, apabila perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada beban tetap yang harus dibayar.”

Penggunaan kedua *leverage* ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dana. Dengan demikian penggunaan *leverage* akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham dan *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuntungan. Tetapi apabila perusahaan mendapat keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham.

2.1.5.3 Pengertian Rasio *Leverage*

Adapun pengertian rasio *leverage* menurut Fahmi (2014:127), yaitu sebagai berikut: “rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.”

Ada pula pengertian rasio *leverage* menurut Kasmir (2014:53), adalah sebagai berikut: “*leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.”

Berdasarkan pengertian rasio *leverage* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

2.1.5.4 Jenis-jenis dan Pengukuran Rasio *Leverage*

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan termasuk ke dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem), yaitu perusahaan yang terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan harus mampu menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Menurut Fahmi (2014:127-132), rasio *leverage* secara umum terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Debt to Total Assets Ratio* atau *Debt Ratio*

Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun rumus *debt to total assets* atau *debt ratio*, yaitu:

$$\text{Debt to Total Assets atau Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Total Liabilities = Total Utang
Total Assets = Total Aset

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan suatu ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Adapun rumus dari *debt to equity ratio*, yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Shareholder's Equity}}$$

Keterangan:

Total Shareholder's Equity = Total Modal Sendiri

Shareholder's equity diperoleh dari total aset dikurangi total utang.

3. *Time Interest Earned*

Rasio ini disebut juga sebagai rasio kelipatan. Adapun rumus dari *time interest earned*, yaitu:

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

Earning before interest and tax (EBIT) = Laba sebelum bunga dan pajak
Interest Expense = Beban bunga

4. *Cash Flow Coverage*

Adapun rumus dari *cash flow coverage*, adalah:

$$\frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depresiasi}}{\text{Fixed Cost} + \frac{\text{Dividen Saham Preferen}}{(1 - \text{Tax})} + \frac{\text{Dividen Saham Preferen}}{(1 - \text{Tax})}}$$

Keterangan:

Depresiasi = Penyusutan
 Fixed Cost = Beban Tetap
 Tax = Pajak

5. *Long-term Debt to Total Capitalization*

Long-term debt to total capitalization disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. *Long-term debt* merupakan sumber dana

pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. Adapun rumus *long-term debt to total capitalization*, adalah:

$$\frac{\text{Long term debt}}{\text{Long term debt} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

Keterangan:

Long term debt = Utang jangka panjang

6. Fixed Charge Coverage

Fixed charge coverage disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk ke dalam pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha. Adapun rumus *fixed charge coverage*, adalah:

$$\frac{\text{Laba Usaha} + \text{Beban Bunga}}{\text{Beban Bunga} + \text{Beban Sewa}}$$

7. Cash Flow Adequacy

Cash flow adequacy disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Adapun rumus *cash flow adequacy*, adalah:

$$\frac{\text{Arus Kas dari Aktivitas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal} + \text{Pelunasan Utang} + \text{Bayaran Dividen}}$$

2.1.5.5 *Debt to Total Assets Ratio* atau *Debt Ratio*

Adapun pengertian *debt to total assets ratio* atau *debt ratio* menurut Fahmi (2014:127), adalah sebagai berikut: “rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung *debt to total assets* atau *debt ratio* menurut Fahmi (2014:128), yaitu:

$$\text{Debt to Total Assets atau Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Total Liabilities = Total Utang
Total Assets = Total Aset

2.1.5.5.1 **Pengertian *Liabilities***

Dalam membiayai operasi dan investasinya, suatu perusahaan tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rencananya. Perusahaan memang dapat memperoleh dana dari setoran modal pemilik, jika setoran pemilik mencukupi untuk biaya seluruh aktivitas perusahaan maka perusahaan tidak membutuhkan tambahan dana dari luar. akan tetapi, dana yang berasal dari pemilik tidak selalu mencukupi untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan,

oleh karena itu perusahaan mencari sumber dana dari luar berupa utang (*liabilities*), baik berupa utang usaha maupun utang bank.

Adapun pengertian utang (*liabilities*) menurut Rudianto (2012:275), adalah sebagai berikut: “utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu.”

Utang dicatat dan diakui sebesar nilai jatuh temponya, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan kepada kreditor pada tanggal yang telah disepakati.

2.1.5.5.2 Jenis-jenis *Liabilities*

Utang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kategori yang diciptakan berdasarkan jenis aktivitas transaksi dan jangka waktu. Adapun utang yang dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas transaksi menurut Rudianto (2012:275-277), yaitu:

“Berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan dan menjadi penyebab munculnya utang, maka utang dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Utang Usaha**, yaitu utang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Contohnya adalah, pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan utang usaha bagi perusahaan.
2. **Utang Bank**, yaitu utang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Utang bank biasanya mencakup persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang dibebankan.
3. **Wiesel Bayar**, yaitu utang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan.
4. **Obligasi**, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta sejumlah bunga sesuai dengan yang dijanjikan.

5. **Utang Dividen**, yaitu kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuk baik kas, surat berharga, maupun saham.
6. **Utang Pajak**, yaitu kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan sebagainya.”

Ada pula utang yang dikelompokkan berdasarkan jangka waktu jatuh temponya menurut Rudianto (2012:277), yaitu:

“Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya, utang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. **Utang Jangka Pendek**, yaitu utang yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah utang usaha, utang dividen, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan lainnya.
2. **Utang Jangka Panjang**, yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun atau 2 tahun atau lebih dari itu. Contohnya adalah, wesel bayar, obligasi dan lainnya.”

2.1.5.5.3 Pengertian *Assets*

Untuk memenuhi tujuannya, setiap perusahaan harus memiliki aset. Tanpa memiliki aset, suatu perusahaan tidak dapat memproduksi suatu produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adapun pengertian aset menurut Rudianto (2012:19), yaitu sebagai berikut:

“Aset adalah harta kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Kekayaan tersebut dapat berupa uang (kas), tagihan (piutang), persediaan barang dagang, peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah, dan sebagainya.”

Aset merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Tanpa aset, perusahaan tidak mampu

beroperasi sehingga aset harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan usahanya.

2.1.5.5.3 Jenis-jenis *Assets*

Aset yang dimiliki perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria yang dimiliki mulai dari aset lancar, aset tidak berwujud, hingga aset tetap berwujud.

Adapun pengertian aset lancar menurut Rudianto (2014:31), yaitu sebagai berikut: “aset lancar adalah harta kekayaan perusahaan yang diperkirakan akan berubah menjadi uang dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan tersebut.”

Sementara itu, pengertian aset tidak berwujud dan aset tetap berwujud menurut Rudianto (2012:46), adalah sebagai berikut:

“Aset tetap (berwujud dan tidak berwujud) adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki dan digunakan untuk mencapai tujuannya dalam kurun waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) sejak disusunnya laporan keuangan.”

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa aset perusahaan terdiri mulai dari aset lancar, aset tidak berwujud, hingga aset tetap berwujud.

2.1.6 Pertumbuhan Perusahaan

2.1.6.1 Pengertian Perusahaan

Adapun pengertian perusahaan menurut Reeve, dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2009:2), adalah sebagai berikut: “usaha atau perusahaan (business) adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar (input), seperti bahan baku dan

tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa (output) untuk pelanggan.”

Ada pula pengertian perusahaan menurut Rudianto (2012:2) adalah sebagai berikut: “perusahaan adalah organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan.”

Berdasarkan pengertian perusahaan diatas maka dapat disimpulkan ahwa perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya bahan baku dan tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang dan jasa untuk pelanggan.

2.1.6.2 Jenis-jenis Perusahaan

Adapun jenis- jenis perusahaan menurut Rudianto (2012:3), jika dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, yaitu:

“Dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. **Perusahaan Jasa**, yaitu perusahaan yang produknya adalah sesuatu yang bersifat nonfisik. Contohnya mencakup perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya.
2. **Perusahaan Dagang**, yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen. Sebagai contoh, pasar swalayan, distributor elektronik, dan sebagainya.
3. **Perusahaan Manufaktur**, yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh, produsen mie instant mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instant siap dikonsumsi, produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja, produsen mebel mengolah kayu menjadi berbagai peralatan mebel.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis perusahaan terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.

2.1.6.3 Pihak-pihak Yang Berhubungan dengan Perusahaan

Dalam rangka menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak, dan pihak-pihak tersebut seringkali membutuhkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan termasuk kondisi keuangan perusahaan. Adapun pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan menurut Rudianto (2012:5), di antaranya:

“Pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan adalah:

1. **Kreditor**, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditor membutuhkan informasi untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar beserta bunganya.
2. **Pemerintah**, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai pihak yang akan memungut pajak penghasilan kepada perusahaan.
3. **Calon Investor**, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya di dalam suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Sebagai pihak yang akan menanamkan uangnya pada perusahaan, calon investor harus memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai dalam jangka panjang.
4. **Pemasok (Supplier)**, yaitu orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, kendaraan, hingga bahan baku usaha. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan
5. **Pemilik/pemegang saham**, yaitu orang atau lembaga yang menanamkan uang atau kekayaannya pada perusahaan. Sebagai pihak yang menanamkan uangnya ke dalam perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkannya tersebut. Imbalan tersebut dapat berupa pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan.
6. **Manajer Produksi**, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan produk di dalam suatu perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya maupun rincian yang diperlukan untuk menghasilkan produk.

7. **Manajer Pemasaran**, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu mulai dari promosi, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Sebagai pihak internal yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pemasaran produk perusahaan, manajer pemasaran memerlukan data biaya produksi dari setiap produknya untuk menentukan harga jual produk tersebut dan rincian biaya pemasaran untuk mencari alternatif biaya pemasaran yang paling efisien bagi perusahaan tanpa mengabaikan efektivitas pemasaran.
8. **Berbagai pihak internal perusahaan lainnya** yang memerlukan data dan informasi keuangan.”

2.1.6.4 Pengertian Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu cerminan dari suatu perusahaan. Pertumbuhan yang terjadi pada suatu perusahaan akan memberikan dampak yang positif bagi beberapa pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Dampak positif yang dirasakan oleh pihak internal dari pertumbuhan perusahaan adalah dengan menilai hasil kinerja yang diperoleh manajemen, sedangkan bagi pihak eksternal adalah mereka mendapatkan gambaran mengenai perusahaan untuk menginvestasikan modalnya jika pertumbuhan perusahaan tersebut terlihat baik.

Adapun pengertian dari pertumbuhan perusahaan menurut Sari (2014), yaitu sebagai berikut: “pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size, yang dapat diproksikan dengan adanya peningkatan aktiva, ekuitas, laba, dan penjualan.”

Ada pula pengertian pertumbuhan perusahaan menurut Sulistiyowati, dkk (2010), yaitu sebagai berikut: “perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan dalam perkembangan usahanya dari tahun ke tahun.”

Berdasarkan pengertian pertumbuhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan untuk meningkatkan usahanya dari tahun ke tahun.

2.1.6.5 Pengertian Rasio Pertumbuhan

Adapun pengertian dari rasio pertumbuhan menurut Fahmi (2014:137), yaitu sebagai berikut: “rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum”

Sementara itu, pengertian rasio pertumbuhan menurut Kasmir (2014:107), yaitu sebagai berikut: “rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisinya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”

Berdasarkan pengertian rasio pertumbuhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam pertumbuhan perekonomian.

2.1.6.6 Jenis-jenis Rasio Pertumbuhan

Menurut Fahmi (2014:137) rasio pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: “rasio pertumbuhan yang umum, dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi *sales*, *earning after tax (EAT)*, laba per lembar saham, dividen per lembar saham, dan harga pasar per lembar saham.”

Sementara itu menurut Kasmir (2014:107), pertumbuhan perusahaan terdiri dari: “pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.”

Ada pula macam-macam rasio pertumbuhan menurut Susanto (2005:391), yaitu diantaranya:

“Pada dasarnya rasio pertumbuhan terdiri dari:

- a. **Rasio pertumbuhan penjualan**, rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.
- b. **Rasio laba bersih**, rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan.
- c. **Rasio laba per saham**, rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba per lembar saham secara keseluruhan. “

2.1.6.7 Rasio Pertumbuhan Laba Bersih

Menurut Susanto (2005:391), rasio pertumbuhan laba bersih adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan laba menurut Simamarta (2010), yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Laba Bersih} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t - 1}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

Laba merupakan dasar pengukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Adapun pengertian laba menurut

Prawironegoro (2008:121), yaitu sebagai berikut: “laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expense*).”

Adapun pengertian dari laba bersih menurut Reeve, dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2009:23), yaitu sebagai berikut: “jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*).”

Ada pula pengertian laba bersih menurut Fahmi (2014:101), yaitu sebagai berikut: “laba setelah pajak (*earning after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih) atau *net profit* yang diterima oleh perusahaan.”

Berdasarkan pengertian laba bersih di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari beban setelah dikurangi oleh pajak.

2.1.7 Tingkat Kesulitan Keuangan

2.1.7.1 Pengertian Kesulitan Keuangan

Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditasnya, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*), dan jika kondisi kesulitan keuangan tersebut tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan terjadinya kebangkrutan usaha (*bankruptcy*).

Menurut Plat dan Plat (2002) dalam Fahmi (2014:158), kesulitan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut: “*financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.”

Kesulitan keuangan atau *financial distress* dimulai sejak ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga yang termasuk ke dalam kewajiban solvabilitas.

Menurut Ilya Avianti (2000) dalam Fahmi (2014:158), ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat ditunjukkan melalui dua metode, yaitu:

- “ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu:
1. *Stock based insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (*negative net worth*).
 2. *Flow based insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan arus kas operasi (*operating cash flow*).”

2.1.7.2 Kategori Tingkat Kesulitan Keuangan

Menurut Fahmi (2014:159), kesulitan keuangan dikategorikan ke dalam berbagai golongan, yaitu sebagai berikut:

- “Untuk persoalan *financial distress* secara umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang dibuat, yaitu:
1. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
 2. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan.

Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan *merger* (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.

3. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang. Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal.
4. **Keempat**, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini dapat segera diatasi.”

2.1.7.3 Penyebab Terjadinya Kesulitan Keuangan

Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditasnya maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*), dan jika kesulitan keuangan tersebut tidak cepat diatasi maka akan berakibat pada kebangkrutan usaha (*bankruptcy*).

Kesulitan keuangan dapat dilihat dari risiko likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan menjadi tidak berjalan secara normal.

Adapun penyebab dari terjadinya risiko likuiditas pada suatu perusahaan menurut Fahmi (2014:164), yaitu:

“Pada saat suatu perusahaan mengalami risiko likuiditas ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya, yaitu:

- a. Utang Perusahaan yang berada pada posisi *extreme leverage*, artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri.

- b. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, *leasing*, mitra bisnis, utang dagang termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang harus secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya.
- c. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka tidak aset tersebut pun masih tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.
- e. Penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jika penjualan dan keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif, maka perusahaan harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat.
- f. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang tutup lubang pada kewajiban jangka pendek, seperti dana untuk memenuhi kewajiban persoalan likuiditas dipakai dari dana membayar utang, sehingga pembayaran utang menjadi tertunda dan begitu sebaliknya.”

2.1.7.4 Pengukuran Tingkat Kesulitan Keuangan

Model yang umum digunakan dalam memprediksi tingkat kesulitan keuangan adalah model prediksi kebangkrutan (*bankruptcy prediction model*). Prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor atau manajemen.

Model prediksi kebangkrutan memberikan suatu tren dan perilaku dari beberapa rasio tertentu. Karakteristik rasio tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan masa depan. Model prediksi kebangkrutan mengasumsikan bahwa rasio keuangan menunjukkan adanya bukti kesulitan dan dapat dideteksi sejak dini, sehingga kita dapat segera mengambil

tindakan untuk menghindari risiko keuangan tersebut atau melakukan kapitalisasi atas informasi tersebut.

Salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman Z-score. Model ini menggunakan beberapa rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan keuangan. Terdapat lima rasio keuangan yang digunakan pada model Z-score, yaitu rasio yang mencerminkan likuiditas, usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif, rasio profitabilitas, struktur keuangan, dan tingkat perputaran modal.

Menurut Subramanyam (2013:288), Altman Z-score dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Zscore = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5$$

Keterangan:

- X1 = Modal kerja/Total aset.
- X2 = Laba ditahan/Total aset.
- X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/Total aset.
- X4 = Ekuitas pemegang saham/Total kewajiban.
- X5 = Penjualan/Total Aset.

Z-score kurang dari 1,20 mencerminkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sementara Z-score di atas 2,90 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang rendah, dan angka di antara 1,20 dengan 2,90 berada pada wilayah abu-abu atau meragukan.

2.1.8 Akuntansi Konservatif

2.1.8.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountant* dalam Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:50), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.”

Adapun pengertian akuntansi menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) dalam Harahap (2008:5), adalah: “proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Reeve, dkk yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2009:9), yaitu sebagai berikut: “akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Ada pula pengertian akuntansi menurut Rudianto (2012:16), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.”

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran yang didasarkan pada transaksi-transaksi keuangan yang menyediakan informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.8.2 Jenis-jenis Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:5) secara umum akuntansi dibagi menjadi dua jenis, di antaranya adalah:

“Secara umum, jika dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan perusahaan, akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. **Akuntansi keuangan** adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya.
2. **Akuntansi manajemen** adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen.”

Sementara itu, jenis akuntansi yang sering ditemui menurut Reeve, dkk yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2009:10), adalah:

“Dua bidang akuntansi yang paling sering ditemui adalah:

1. **Akuntansi keuangan (*Financial Accounting*)**, sangat terkait dengan pencatatan dan pelaporan data dan aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Selain itu, laporan ini berguna bagi manajer, laporan tersebut juga menjadi laporan utama bagi pemilik usaha, kreditor, badan pemerintah, dan masyarakat. Tujuan dari akuntansi keuangan

adalah menyediakan laporan yang berguna untuk kebutuhan dalam menentukan pilihan investasi.

2. **Akuntansi manajerial** (*Managerial Accounting*) atau akuntansi manajemen (*management accounting*), menggunakan akuntansi keuangan maupun data setimasi untuk membantu manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional harian dan merencanakan aktivitas operasional di masa depan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi yang sering ditemui adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial.

2.1.8.3 Tujuan Akuntansi

Tujuan utama dari pelaporan akuntansi adalah untuk mendukung pemegang saham dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan keuangan mereka dengan membantu mereka dalam meramalkan arus kas perusahaan.

Adapun tujuan dari akuntansi menurut *Accounting Research Study No. 1* dalam Hendriksen dan Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2000:135), yaitu sebagai berikut:

“*Accounting Research Study No. 1*, menyatakan tujuan akuntansi adalah:

1. Untuk mengukur sumberdaya yang dimiliki oleh satuan usaha tertentu.
2. Untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan terhadap dan kepentingan dalam satuan usaha tersebut.
3. Untuk mengukur perubahan dalam sumberdaya, tuntutan dan kepentingan tersebut.
4. Untuk menetapkan perubahan itu pada periode waktu yang dapat ditentukan.
5. Untuk menyatakan hal-hal di atas dalam nilai uang sebagai satuan umum.”

Tujuan akuntansi dapat berfokus pada salah satu dari tiga tingkatan teori akuntansi, yaitu tingkat sintatik, semantik, dan pragmatik. Tingkat sintatik

berfokus pada tata bahasa akuntansi, tingkat sematik berfokus pada artinya, dan pragmatik berfokus pada penggunaannya.

2.1.8.4 Prinsip Dasar Akuntansi

Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini dapat menjadi keterbatasan atau sekaligus menjadi kekuatan pada suatu informasi.

Adapun prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement No. 4 dalam Harahap (2008:75), di antaranya adalah:

1. *The Cost Principle*

Cost principle atau disebut juga *acquisition cost* atau *historical cost* adalah dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan *equity*. Dengan perkataan lain, setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukarannya pada tanggal perolehan. Kelemahan dari prinsip ini adalah akibat dari nilai uang/kemampuan daya beli yang tidak stabil sehingga dapat terjadi kemungkinan kesalahan pembaca dalam membaca laporan keuangan yang disajikan secara *cost principle*.

2. *The Revenue Principle*

Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen, pengukuran dan pengakuan *revenue* sebagai salah satu elemen penyusunan laporan laba rugi. Ketiga aspek itu dijelaskan sebagai berikut:

a. Sifat dan Komponen dari *Revenue*

Pada umumnya *revenue* telah ditafsir sebagai:

- 1) Arus masuk *net asset* sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
- 2) Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada langganan.
- 3) Produksi perusahaan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu.

b. Pengukuran *Revenue*

Revenue diukur menurut produk atau jasa yang ditukar dengan cara transaksi yang objektif atau istilah akuntansinya adalah *arm's transaction*.

c. Bukti Pengakuan *Revenue*

Secara umum *revenue* dan laba diakui sepanjang tahap (siklus) operasi, yaitu selama masa diterima, diproduksi, dijual, dan ditagih. *Revenue* akan diakui secara:

1) *Accrual Basis*

Pengakuan *revenue* secara *accrual basis* berarti bahwa *revenue* harus dilaporkan selama kegiatan produksi (di mana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan), pada akhir produksi, pada saat penjualan barang atau pada saat penagihan piutang.

2) *Critical Event Basis*

Dalam metode ini, yang diperhatikan adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Kejadian kritis itu dapat berupa:

- a) Pada saat penjualan.
- b) Pada saat selesainya proyek.
- c) Pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan.

3) *The Matching Principle*

Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Hasil diakui pada periode menurut prinsip pengakuan hasil dan biaya akan dibebankan pada periode itu.

4) *The Objectivity Principle*

Kegunaan laporan keuangan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan kepada prosedur pengukuran yang digunakan. Untuk meningkatkan keyakinan pada laporan keuangan ini sangat sulit sehingga akuntan menggunakan prinsip *objectivity* untuk membenarkan pilihan atas suatu ukuran atau prosedurnya.

5) *The Consistency Principle*

Menurut prinsip konsistensi, kejadian ekonomis yang sejenis harus dicatat, dilaporkan secara konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Artinya, prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode itu. Kegunaan prinsip ini adakah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Selain itu, dengan penerapan prinsip ini maka maipulasi laporan Laba/Rugi dan neraca melalui penggunaan prinsip yang berbeda-beda akan dapat dihindarkan.

6) *The Disclosure Principle*

Laporan keuangan harus disajikan secara *full* (penuh), *fair* (wajar), dan *adequate* (cukup). Konsep *full disclosure* mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi sehingga membuat pihak umum atau investor paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

7) *The Conservatism Principle*

Prinsip ini merupakan prinsip yang apabila kita dihadapkan untuk memilih di antara dua atau lebih prinsip/teknik akuntansi yang sama-sama diterima, maka kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan yang paling kecil pada *equity* pemilik. Lebih khusus lagi kita harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva dan hasil, dan nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang akan dibayar.

8) *The Materiality Principle*

Menurut prinsip ini, transaksi dan kejadian yang memiliki pengaruh ekonomi yang penting dapat dicatat dengan cara yang dipermudah tanpa melihat apakah sesuai dengan prinsip akuntansi dan perlu tidaknya diungkapkan.

9) *The Uniformity dan Comparability Principle*

Prinsip *uniformity* berarti menggunakan prosedur yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh

penyusunan prinsip akuntansi adalah agar laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat diperbandingkan.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement No. 4, yaitu terdiri dari *the cost principle*, *the revenue principle*, *the matching principle*, *the objectivity principle*, *the consistency principle*, *the disclosure principle*, *the conservatism principle*, *the materiality principle* dan *the uniformity dan comparability principle*.

2.1.8.5 Akuntansi Konservatif

2.1.8.5.1 Pengertian Konservatisme

Setiap perusahaan akan menghadapi kejadian-kejadian yang belum pasti (*uncertainty*) terjadi pada perusahaannya. Ketidakpastian tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menginformasikan laporan keuangan dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan. Perusahaan yang menganut konservatisme akuntansi, dalam menyikapi ketidakpastian akuntansi (penyusun standar) akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan (keadaan, harapan, kejadian, atau hasil) yang dianggap kurang menguntungkan (Suwardjono, 2010).

Konservatisme merupakan salah satu sifat dasar akuntansi yang menjunjung tinggi sikap kehati-hatian dan kewaspadaan karena lingkungan ekonomi dipenuhi oleh ketidakpastian. Akuntansi konservatif mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

Adapun pengertian konservatisme menurut Hendriksen dan Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2000:157), adalah sebagai berikut:

“Istilah konservatisme umumnya digunakan untuk mengartikan bahwa akuntan harus melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban.”

Sementara itu, pengertian konservatisme berdasarkan *glossary* dalam FASB Statement of Concept No. 2 dalam Sari (2004), adalah: “konservatisme adalah reaksi hati-hati (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan.”

Ada pula pengertian konservatisme menurut Suwardjono (2010:245), yaitu sebagai berikut: “konservatisme adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut”

Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme di atas maka dapat disimpulkan bahwa konservatisme merupakan tindakan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara melaporkan yang terendah dari aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari kewajiban dan beban.

2.1.8.5.2 Jenis-jenis Konservatisme

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

“Konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*)**, yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten

dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu, aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. **Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*)**, yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.”

Dari kedua macam akuntansi konservatisme, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.8.5.3 Pengertian Prinsip Konservatisme

Konservatisme akuntansi merupakan salah satu dari sembilan prinsip dasar akuntansi dalam APB Statement No. 4 yaitu *The Conservatism Principle*. Prinsip ini merupakan prinsip pengecualian atau prinsip yang mengubah konsensus umum. Dikatakan mengubah karena prinsip ini membuat pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya (Harahap, 2008).

Adapun pengertian prinsip akuntansi menurut Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:288), yaitu sebagai berikut: “prinsip konservatisme (*conservatism principle*) adalah

suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal.”

Menurut prinsip ini, apabila kita dihadapkan untuk memilih di antara dua atau lebih prinsip/teknik akuntansi yang sama-sama diterima, maka kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada *equity* pemilik. Lebih khusus lagi kita harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva dan hasil, serta nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang akan dibayar (Harahap, 2008).

Prinsip tersebut menggambarkan bahwa akuntansi itu menganut sikap “pesimis” sewaktu memilih prinsip akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Prinsip ini digunakan untuk hal atau lingkungan yang sifatnya tidak menentu dan prinsip ini juga mengharuskan kita untuk bersikap hati-hati dalam melaporkan aktiva dan pendapatan serta kewajiban dan beban, yaitu dengan cara melaporkan yang terendah dari beberapa nilai dari aktiva dan pendapatan, serta melaporkan yang tertinggi dari kewajiban dan beban.

Jika terdapat potensi kerugian pada perusahaan, walaupun belum terealisasi tetapi sudah terdapat dasarnya maka sudah dapat dicatat atau diinformasikan, sedangkan apabila terdapat laba yang belum terealisasi, walaupun sudah diduga memperoleh laba maka belum dapat dicatat sebagai laba. Prinsip ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pendapatan bersih dan aktiva hendaknya tidak dicatat terlalu tinggi (*overstated*), namun juga tidak berarti boleh dicatat lebih rendah (*understated*).

Secara lebih spesifik, prinsip tersebut mengimplikasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban sebaiknya dipilih untuk dilaporkan. Konservatisme juga menyiratkan bahwa beban harus diakui segera dan pendapatan diakui nanti. Oleh karena itu aktiva bersih lebih cenderung dinilai di bawah harga pertukaran kini daripada di atasnya, dan perhitungan laba mungkin menghasilkan yang terendah dari beberapa jumlah alternatif.

Konservatisme saat ini lebih dipandang sebagai pedoman untuk diikuti dalam situasi luar biasa, dan bukan sebagai aturan umum untuk diterapkan secara kaku dalam sebuah situasi. Konservatisme juga masih digunakan dalam beberapa situasi yang memerlukan penilaian akuntan, seperti memilih estimasi umur manfaat dan nilai sisa dari aktiva untuk akuntansi depresiasi dan konsekuensi aturan dari penerapan “mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar” (*lower of cost market*) dalam penilaian persediaan dan efek-efek ekuitas yang dapat dijual (Belkaoui, 2008).

Aturan mana yang terendah antara biaya atau harga pasar (*lower of cost market*), yang disingkat sebagai LCM menunjukkan konservatisme akuntansi dalam praktiknya. LCM mengharuskan agar persediaan dilaporkan dalam laporan keuangan secara lebih rendah antara biaya historis persediaan atau nilai pasar persediaan.

Prinsip akuntansi mengharuskan akuntan untuk menampilkan sikap pesimistis secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan keuangan. Sikap pesimisme ini diasumsikan lebih baik daripada optimisme dalam

laporan keuangan. Terdapat tiga argumen mengenai konservatisme menurut Hendriksen dan Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2000:158), di antaranya:

“Terdapat tiga argumen mengenai konservatisme, yaitu:

1. Kecenderungan akuntan terhadap pesimisme dianggap penting untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan dari manajer dan pemilik. Pemilik perusahaan pada dasarnya optimis mengenai perusahaan mereka sendiri. Optimisme ini cenderung direfleksikan dalam pemilihan dan penekanan dalam laporan akuntansi. Melalui tekanan kreditor dan pemakai laporan keuangan lain, akuntan abad ke-19 di bawah tekanan untuk menjauhkan diri dari pernyataan optimisme ini dalam laporan mereka.
2. Lebih saji laba dan penilaian lebih berbahaya untuk bisnis dan pemiliknya daripada kurang saji. Maksudnya adalah konsekuensi kerugian atau kebangkrutan lebih serius daripada konsekuensi keuntungan. Karenanya, dikemukakan tidak ada alasan bahwa aturan pengukuran dan pengakuan kerugian sama dengan keuntungan bila konsekuensinya berbeda.
3. Akuntan mempunyai akses lebih banyak informasi daripada yang dapat dikomunikasikan kepada investor dan kreditor dan akuntan dihadapkan pada dua jenis risiko dalam melaksanakan audit. Akuntansi menyiratkan bahwa hukuman karena mengungkapkan lebih besar daripada hukuman tidak mengungkapkan.”

2.1.8.5.4 Akuntansi Konservatif dalam PSAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan ada berbagai metode yang menerapkan prinsip konservatisme. Jika ditinjau lebih jauh ke dalam laporan keuangan, setiap metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa metode akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut dengan PSAK (IAI, 2009), yang memberikan peluang kepada manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005; Widyaningrum, 2008) dalam Hendrianto (2012), yaitu:

“Beberapa metode dalam PSAK (IAI, 2009) yang memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif antara lain:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan.
2. PSAK No. 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan telah diganti oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap.
3. PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.
4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud.”

Berdasarkan metode dalam PSAK yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan.

PSAK No. 14 paragraf 21 menyatakan biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing.

Pada paragraf 23 dijelaskan mengenai biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.

Metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau biasa disebut *first in first out (FIFO)* merupakan metode yang optimis jika dibandingkan dengan metode LIFO dan rata-rata tertimbang yang menghasilkan angka

laba lebih rendah (Dewi, 2004). Namun, metode perhitungan biaya persediaan yang diakui di dalam PSAK No. 14 (Revisi 2008) hanya terdapat dua metode, yaitu MPKP atau FIFO dan rata-rata tertimbang. Jika dilihat dari kedua metode perhitungan biaya persediaan maka metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif, karena biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi besar, sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil.

2. PSAK No. 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan telah diganti oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap.

PSAK No. 16 paragraf 63 menyatakan, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*).

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Metode penyusutan atau amortisasi aktiva tetap atau tak berwujud akan lebih konservatif jika periode penyusutan semakin pendek, dan semakin optimis jika periode penyusutan semakin panjang (Dewi, 2003). Hal tersebut dikarenakan oleh, jika periode penyusutan semakin pendek maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

3. PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

PSAK NO. 19 dalam revisi tahun 2009 pada paragraf 97 menyatakan bahwa nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Paragraf 98 menjelaskan mengenai berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.

Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sulit menemukan metode amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas yang menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah daripada akumulasi amortisasi berdasarkan garis lurus.

4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud.

PSAK No. 19 dalam revisi tahun 2009 pada paragraf 41 menyebutkan bahwa pengeluaran penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan proyek penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan pada perolehan secara terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset tak berwujud.

Lalu pada paragraf 42 dijelaskan mengenai pengeluaran atas proyek penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan, baik proyek tersebut diperoleh terpisah atau dari kombinasi bisnis dan proyek tersebut diakui sebagai aset tidak berwujud: (a) diakui sebagai beban saat terjadinya jika merupakan pengeluaran penelitian, (b) diakui sebagai beban saat terjadinya jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tidak berwujud dalam paragraf 56, dan (c) ditambahkan kepada jumlah tercatat dari proyek penelitian dari pengembangan dalam proses jika biaya pengembangan tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 57.

Berdasarkan uraian pada paragraf 42 dapat diketahui bahwa proyek penelitian dan pengembangan diakui sebagai beban dan biaya. Kondisi tersebut mendasari pernyataan bahwa laporan keuangan akan menjadi konservatif apabila proyek penelitian dan pengembangan diakui sebagai beban, karena apabila diakui sebagai aset maka akan mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi besar dan menjadi tidak konservatif.

2.1.8.5.5 Pengukuran Akuntansi Konservatif

Terdapat tiga tipe pengukuran untuk menilai konservatisme menurut Watts (2003) dalam Deviyanti (2012), yaitu:

“Tiga tipe pengukuran untuk menilai konservatisme, yaitu:

1. *Earning/stock return relation measures.*
2. *Earning/accrual measures.*
3. *Net asset measures.*”

Berdasarkan tiga tipe pengukuran konservatisme di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Earning/stock return relation measures*

Menurut Wibowo (2002) dalam Widya (2004), tingkat konservatisme dapat diukur dengan meregresi laba dan return melalui persamaan sebagai berikut:

$$EPS_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 Rit + \beta_1 DR_{it} * Rit + e_{it} \dots$$

Keterangan:

- EPS_{it} = Laba per lembar saham perusahaan i tahun t
 Rit = Return saham perusahaan i tahun t
 DR_{it} = Variabel dummy dengan nilai 1 jika $Rit < 0$ (proksi kabar buruk) dan 0 jika $Rit > 0$ (proksi kabar baik)
 α_0 = Intersep
 α_1 = Koefisien variabel dummy jenis periode
 β_0 = Koefisien (slop) regresi
 β_1 = Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode
 e_{it} = *Error terms*

Jika koefisien β_1 memiliki tanda positif dan secara signifikan berbeda dengan nol maka terjadi konservatisme laba pada perusahaan.

2. *Earning/accrual measures*

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme menurut Sari (2004), yaitu:

$$CONACCit = NIit - CFOit$$

Keterangan:

- Cit = Tingkat konservatisme.
 NIit = *Net income* sebelum *extraordinary item* ditambah depresiasi dan amortisasi.
 CFit = *Cash flow* dari kegiatan operasi.

3. *Net asset measures*

Untuk menghitung *net asset measures*, Widya (2004) menggunakan proksi rasio *market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus yang digunakan oleh Gitman (2010:70) dalam Wulianti (2013), untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book (M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price per share of common stock}}{\text{Book value per share of common stock}}$$

Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* lebih dari 1 menunjukkan perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif (Brilianti, 2013).

2.1.8.5.6 *Earning/accrual measures*

Givoly dan Hayn (2000) dalam Sari (2004), mengukur konservatisme dengan melihat kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme menurut Sari (2004), yaitu:

$$CONACCit = NIit - CFOit$$

Keterangan:

Cit = Tingkat konservatisme.

NIit = *Net income* sebelum *extraordinary item* ditambah depresiasi dan amortisasi.

CFit = *Cash flow* dari kegiatan operasi.

Apabila selisih antara laba bersih dan arus kas bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif yang berarti menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan laba lebih kecil dari arus kas operasi, dan apabila selisih antara laba bersih dan arus kas bernilai positif, maka tidak konservatif yang berarti menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan labanya lebih besar dari arus kas operasi (Agustin, 2011).

2.1.8.5.6.1 *Pengertian Net Income*

Adapun pengertian dari *net income* (laba bersih) menurut Reeve dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2009:23), yaitu sebagai berikut: “jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*).”

Ada pula pengertian laba bersih menurut Fahmi (2014:101), yaitu sebagai berikut: “laba setelah pajak (*earning after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih) atau *net profit* yang diterima oleh perusahaan.”

Berdasarkan pengertian laba bersih di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari beban setelah dikurangi oleh pajak.

2.1.8.5.6.2 Pengertian *Extraordinary Item*

Adapun pengertian *extraordinary item* menurut Ghazali dan Chariri (2007:366), yaitu:

“*Extraordinary item* adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material, dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan.”

Ada pula pengertian *extraordinary item* menurut Harahap (2008:243), yaitu sebagai berikut:

“APB mengartikan *extraordinary item* sebagai kejadian atau transaksi yang memengaruhi secara materiil yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali dan tidak dianggap merupakan hal yang berulang dalam proses operasi yang biasa dari suatu perusahaan.”

Berdasarkan pengertian *extraordinary item* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *extraordinary item* merupakan suatu transaksi yang memiliki pengaruh material yang jarang terjadi berulang kali dan diharapkan tidak berulang dalam kegiatan perusahaan.

Menurut APB Opinion No. 30 dalam Ghazali dan Chariri (2007:366), yang termasuk ke dalam *extraordinary item* adalah:

“Elemen laporan keuangan dikatakan sebagai *extraordinary item* jika memenuhi dua syarat berikut ini:

- a. Tidak umum (*unusual*), artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung terus menerus, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.
- b. Jarang Terjadi (*infrequency of occurrence*), artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.”

2.1.8.5.6.3 Pengertian Depresiasi

Adapun pengertian depresiasi atau penyusutan menurut Giri (2012:247), yaitu sebagai berikut: “depresiasi adalah proses sistematis dan rasional untuk mengalokasikan kos atau biaya aset selama taksiran manfaat aset tetap dan pembebanannya pada perioda yang menerima manfaat aset tetap.”

Sementara itu, pengertian penyusutan menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 adalah: “penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.”

Ada pula pengertian penyusutan menurut Rudianto (2012:260), yaitu sebagai berikut: “penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.”

Berdasarkan pengertian depresiasi atau penyusutan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa depresiasi atau penyusutan merupakan pengalokasian sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya

2.1.8.5.6.4 Pengertian Amortisasi

Adapun pengertian amortisasi menurut PSAK No. 19 Revisi 2009, yaitu sebagai berikut: “amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya.”

Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi esntitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Penerapan Akuntansi Konservatif

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditanam kembali di dalam perusahaan untuk menambah modal investasi di masa yang akan datang. Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan sesuai dengan jenis saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham, serta jenis pembayarannya tergantung kepada kebijakan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan.

Berdasarkan hubungan keagenan yang terjadi di antara manajer, pemegang saham dan kreditor yang dapat menimbulkan konflik atau masalah keagenan seputar kebijakan dividen. Pembayaran dividen kas dalam jumlah besar akan menyebabkan berkurangnya aktiva yang tersedia untuk melunasi utang perusahaan kepada kreditor. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, *debtholder* biasanya akan mensyaratkan pembatasan pembayaran dividen (Sari, 2004).

Pembatasan pembayaran dividen tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dahulu, prinsip konservatisme digunakan untuk hal atau lingkungan yang sifatnya tidak menentu dan untuk menghadapi kemungkinan manajer/pemilik terlalu optimis dengan maksud untuk melindungi kreditor dari pembagian kekayaan perusahaan dalam bentuk dividen.

Watts (2003) dalam Widya (2004) menyatakan bahwa konservatisme berperan penting dalam menyajikan laba dan aktiva yang konservatif. Konservatisme akan membatasi perilaku oportunistik manajer dalam menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu semakin tinggi konflik antara manajer dan pemegang saham mengenai kebijakan dividen maka perusahaan tersebut akan semakin konservatif. Hal ini terjadi karena manajemen berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya dengan konservatisme akuntansi agar jumlah laba yang dilaporkan menjadi semakin kecil sehingga jumlah dividen yang dibagikan juga semakin kecil (Widanaputra, 2010).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti kebijakan dividen, yaitu antara lain: Hermawan (2010) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi konservatif, Widanaputra (2010) menunjukkan bahwa *dividend payout ratio* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, dan Aristiyani (2013) menunjukkan bahwa *dividend payout ratio* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penerapan Akuntansi Konservatif

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dan sumber dananya yang mana aset dan sumber dana tersebut memiliki biaya tetap atau beban tetap. *Leverage* yang timbul akibat keputusan investasi yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap disebut *operating leverage*, sedangkan *leverage* yang timbul akibat keputusan pendanaan dengan menggunakan utang disebut dengan *financial leverage*.

Berdasarkan hubungan keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan kreditor yang tidak jarang timbul masalah keuangan mengenai pembayaran utang. Kreditor juga seringkali merasa dieksploitasi oleh pemegang saham. Pandangan ini terjadi ketika kreditor membantu perusahaan dalam melakukan investasi atau ekspansi perusahaan dengan menggunakan dana yang diberikannya, yang dapat menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan juga bagi kreditor. Jika perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi dan itu berhasil, maka pihak yang paling banyak menikmati keberhasilan tersebut adalah pemegang saham, tetapi apabila ekspansi tersebut mengalami kegagalan atau perusahaan mengalami kebangkrutan maka kreditor juga harus turut menanggung kerugian tersebut.

Sementara itu, berdasarkan *signaling theory* (teori sinyal) menurut Sudana (2011:153), perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. Pada perusahaan yang mempunyai utang yang tinggi, maka kreditor memiliki hak yang lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan operasi serta penggunaan metode akuntansi perusahaan.

Suatu perusahaan yang memprediksi labanya rendah akan cenderung untuk menggunakan tingkat utang yang rendah. Namun, tingkat utang perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tingkat risiko keuangan yang dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Tingkat risiko keuangan ini dapat dilihat dengan menggunakan rasio utang (*leverage*). Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

Semakin tinggi rasio utang, maka semakin besar kemungkinan perusahaan mendekati batas perjanjian kredit. Lalu, semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Oleh karena itu perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatis (Ahmed dan Duellman, 2007) dalam Alhayati (2013).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti *leverage*, yaitu: Aristiyani (2010) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, Deviyanti (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi, dan Brilianti (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerapan Akuntansi Konservatif

Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan usahanya dari tahun ke tahun. Menurut Mayangsari dan Wilopo dalam Alfian (2013), perusahaan yang menggunakan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya, identik dengan perusahaan yang tumbuh. Hal tersebut dikarenakan oleh terdapatnya cadangan tersembunyi pada perusahaan tersebut yang digunakan untuk melakukan investasi atau memperbesar perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan tersebut akan direspon dengan baik oleh investor dan calon investor, karena terdapat *goodwill* pada perusahaan. *Goodwill* tersebut muncul karena perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme memiliki nilai pasar yang lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya. Selain investor dan calon investor yang merespon baik pertumbuhan yang terjadi pada perusahaan, pasar juga akan menilai positif atas investasi yang dilakukan perusahaan, karena dari investasi yang dilakukan saat ini diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus kas dimasa depan.

Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka semakin cenderung perusahaan memilih strategi akuntansi konservatif. Hal ini terjadi karena perusahaan yang menggunakan prinsip akuntansi konservatif terdapat cadangan tersembunyi yang digunakan untuk investasi (Widya, 2004).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti pertumbuhan perusahaan, yaitu: Kurniawan (2013) menunjukkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, dan Saputri (2013) menunjukkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

2.2.4 Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Terhadap Penerapan Akuntansi Konservatif

Kesulitan keuangan atau *financial distress* dimulai sejak ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga yang termasuk ke dalam kewajiban solvabilitas. Kesulitan keuangan juga merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Kreditor memiliki hak atas sebagian laba dan sebagian aktiva perusahaan terutama dalam kasus kebangkrutan.

Berdasarkan teori signaling, jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal, namun jika perusahaan dalam kesulitan keuangan dan mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif yang

tercermin dalam akrual diskrisioner negatif untuk meunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba periode kini serta yang akan datang lebih buruk daripada non-diskrisioner periode kini (Alhayati, 2013). Dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi, dan sebaliknya.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti tingkat kesulitan keuangan perusahaan yaitu: Utami (2013) menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, Lo (2005) menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, Ningsih (2013) menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif.
- H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif.
- H3 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif.
- H4 : Tingkat Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif.
- H5 : Kebijakan dividen, *Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan dan Tingkat Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif.